



Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Perjanjian Kinerja

Tahun
2022

Nomor: S-783/PW22/1/2022 Tanggal 10 Desember 2021



PERJANJIAN KINERJA
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional/daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Masykur
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muhammad Yusuf Ateh
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) serta Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021
Pihak Pertama,

Muhammad Masykur
NIP. 19640227 198402 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERWAKILAN BPKP BALI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	610,00
		2 Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	3.237,35
		3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	203.792,64
		4 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	49.715,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	0,00
		2 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85,00
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0,00
		2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9,00
		3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1,00
		4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	27,00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100,00
		2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80,00
		3 Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1,00
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1,00
		2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/kota	8,00
		3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1,00
		4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/kota	9,00
		5 Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1,00
		6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/kota	3,00
		7 Persentase desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	100,00
		8 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	3,00
		9 Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	90,00
		10 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	61,00
		11 Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	0,00
		12 Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	3,00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	86,00
		2 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95,00
		3 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100,00
		4 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80,00
		5 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	81,00
		6 Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	Persen	100,00
		7 Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	65,00
		8 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	76,00

Program

- 1 Pengawasan Pembangunan di Perwakilan
- 2 Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Anggaran


Rp 1.848.950.000,00
Rp 20.437.351.000,00
Rp **22.286.301.000,00**

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Kepala BPKP


Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001

Kepala Perwakilan


Muhammad Masykur
NIP. 19640227 198402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN**

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.1.a.	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	204	-	√	-	-
2	A.1.b.	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	204	-	-	√	-
3	A.1.c.	Bantuan Operasional Sekolah	204	√	-	-	-
4	A.1.d.	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	204	-	√	-	-
5	A.1.e.	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	204	-	√	-	-
6	A.2.a.	Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	203	√	√	√	√
7		Penanganan Covid-19 (Pembayaran Klaim Rumah Sakit)	203	√	√	√	√
8	A.2.b.	Stunting	204	-	-	√	-
9	A.2.d.	Reformasi Sistem Kesehatan (Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes)	201	-	-	-	√
10		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Primer)	203	-	-	-	√
11		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	203	-	-	-	√
12		Reformasi Sistem Kesehatan (Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan)	203	-	-	-	√
13	A.3.a.	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	203	√	-	-	-
14	A.3.c.	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	203	-	√	-	-
15	A.3.d.	Implementasi Bansos APBD	302	-	√	-	-
16	A.3.e.	Implementasi Bansos APBDesa	303	-	√	-	-
17	B.1.b.	Infrastruktur SPAM	103	-	-	-	√
18			405	-	-	-	√
19	B.1.c.	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	103	-	-	-	√
20	B.2.b.	Infrastruktur Jaringan Irigasi	103	-	-	√	-
21	B.3.a.	Pembangunan Jalan	103	-	-	-	√
22	B.3.b.	Pembangunan Jembatan	103	-	-	-	√
23	B.3.d.	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)	103	-	-	-	√
24	B.3.e.	Pembangunan Bandara	103	-	-	-	√
25	B.3.f.	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	103	-	-	-	√
26	B.4.a.	Penyediaan BTS	204	-	-	√	-
27	B.4.b.	Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet	204	-	-	√	-
28	C.2.a.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	301	√	-	-	-
29	C.2.b.	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	301	√	√	-	√
30	C.2.c.	Optimalisasi PAD	301	-	√	-	-
31	C.2.d.	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	302	-	-	√	-
32	C.2.f.	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD)	302	√	√	√	√
33	C.3.a.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Perencanaan)	303	√	-	-	-
34		Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Akuntabilitas)	303	√	√	√	√
35	C.3.b.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	303	√	-	-	-
36	C.4.a.	BUMN	401	-	-	√	-
37	D.1.a.	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	104	-	√	-	√
38	D.1.b.	Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Non KUR, baik reguler maupun tambahan)	403	-	√	-	√
39	D.3.b.	Kemudahan Perizinan (OSS)	302	√	-	-	-
40	D.4.b.	P3DN (fokus pada industri Kesehatan, Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)	104	√	-	-	-
41	D.5.b.	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19	104	-	-	-	√
42	E.1.a.	Tata Kelola Subsidi Pupuk	403	-	-	√	-


NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
43	E.1.b.	Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Pertanian)	102	-	-	√	-
44		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	302	-	-	√	-
45		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	303	-	-	√	-
46	E.1.c.	Tata Kelola Program Bibit Ternak	102	-	-	√	-
47		Tata Kelola Program Bibit Ternak	302	-	-	√	-
48		(Dana Kemendes PDTT dan APBD)	303	-	-	√	-
49	E.2.b.	Dukungan Peralatan Produksi Perikanan	102	-	-	√	-
50	E.5.a	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	401	-	-	√	-
51	F.1.a.	Reformasi Birokrasi	205	-	-	√	-
52	F.1.b.	SPIP	304	-	-	-	√
53	F.1.c.	Kapabilitas APIP	304	-	-	-	√
54	F.2.a	Pencegahan Kecurangan	501	-	√	-	-
55	F.2.b	Deteksi Kecurangan	502	-	√	-	-
56	F.2.c	Respon Kecurangan	503	-	√	-	-
57	G.2.b.	Kartu Sembako	203	-	-	√	-
58	G.2.d.	Kartu Indonesia Pintar	302	-	-	√	-
59	G.3.e.	Optimalisasi Program Padat Karya	102	-	-	√	-
60			103	-	-	√	-
61	G.3.f.	Pengembangan Potensi Desa	303	-	-	√	-

Kepala BPKP


Muhammad Yusuf Ateh
 NIP. 19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Kepala Perwakilan


Muhammad Masykur
 NIP. 19640227 198402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH**

NO	NAMA CLUSTER	TEMA PENGAWASAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	RENDAL	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pariwisata	Pengawasan atas Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali <i>Maritime Tourism Hub</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis desain/kebijakan atas Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali <i>Maritime Tourism Hub</i>. 2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Program Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali <i>Maritime Tourism Hub</i>. 3. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas Program Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali <i>Maritime Tourism Hub</i>. 4. Analisis kinerja Program Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali <i>Maritime Tourism Hub</i> dihubungkan dengan konektivitas/aksesibilitas, konservasi budaya, lingkungan dan maritim, peningkatan industri pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi regional (PDRB). 5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait. 	D 1.4				✓
2	Pariwisata	Pengawasan atas Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis desain/kebijakan atas Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, termasuk analisis keuangan (<i>financial analysis</i>) terkait dengan penggunaan sumber pembiayaan dari pinjaman daerah. 2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Program Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. 3. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas Program Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. 4. Analisis kinerja Program Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung dihubungkan dengan dampak ke konservasi kekayaan budaya, peningkatan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi regional (PDRB). 5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait. 	D 1.4				✓

Kepala BPKP

 Muhammad Yusuf Ateh
 NIP. 19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021
 Kepala Perwakilan

 Muhammad Masykur
 NIP. 19640227 198402 1 001